

Dilema Politik Hukum dan Kebudayaan

KEMUNCULAN Sunda Empire adalah fenomena sosial yang menarik. Menyuarakan kritik, menawarkan solusi sekaligus mengawasi bagaimana negara ini dijalankan. Berita Sunda Empire seolah-olah menarik perhatian publik dan media dengan "pesan" yang "memak-sa publik dan (mungkin) juga negara untuk berpikir keras", "berpikir kritis dengan akal sehat.

Dalam cuplikan pernyataan Sunda Empire dari satu video yang diunggah pada 6 Juli 2019, HRH Rangga yang mengklaim sebagai Gubernur Jenderal Nusantara mengatakan, "Dalam menyambut Indonesia baru yang lebih makmur dan sejahtera, dengan sistem pemerintahan dunia yang dikendalikan di koordinat 0.0 di Bandung sebagai mercusuar dunia. Masa pemerintahan dunia yang sekarang akan segera berakhir sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyoang kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Agar kita tidak menjadi budak di negara sendiri dan hidup hanya untuk membayar tagihan yang terus naik dan biaya hidup yang terus melambung tinggi, apalagi biaya pendidikan anak yang tidak gratis, setelah itu kita tua dan mati, terus pikniknya kapan?"

Ihwal apa yang menarik dari pernyataan tersebut? Apakah ini sekadar ekspresi utopis, sarkas, atau frustrasi dari seorang warga negara kepada negaranya? Ataukah ada hal lain yang melampaui itu? Dalam tulisan singkat ini saya ingin mengurai fenomena sosial ini dengan menggunakan dua perspektif

Dian Andriasari

Dosen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unisba



yakni politik hukum dan politik kebudayaan.

Perspektif pertama, politik hukum adalah *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan sebuah negara. Sunaryati Hartono mengemukakan tentang hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum itu adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan.

Kembali pada cuplikan pernyataan dari video itu, apakah pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai upaya "makan" atau menggulingkan pemerintahan yang sah? Sayangnya, makan tidak didefinisikan dengan tegas dalam KUHP.

Penjelasan-penjelasan makan merupakan istilah yang dipakai oleh akademisi hukum untuk menerjemahkan kata *aanslag*. *Aanslag* diartikan sebagai serangan yang bersifat kuat atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *violent attack, fierce attack*.

Makar diatur dalam Pasal 87, 104, 106, 107 KUHP.

Pasal makan pernah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta makan harus dimaknai sebagai "serangan", sehingga harus dianggap sebagai delik selesai. Namun, MK menilai argumen itu tidak bisa diterima.

MK berpendapat, percobaan makan tanpa perlu tujuan makar tercapai yaitu pemerintah

yang terguling --pun sudah bisa dikenai delik. Dalam perspektif ini masyarakat tinggal menunggu dan menguji hasil kerja dari kepolisian negara apakah gerakan Sunda Empire dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana makar atau bukan.

Penjelasan politik hukum sangat terbatas untuk menjawab fenomena sosial ini. Dalam perspektif ini, gerakan Sunda Empire adalah bias yang sudah bisa dipastikan warnanya; hitam atau putih; benar atau harus dibukuh. Hukum sekedar menjadi penanda otoritas dan kekuasaan negara atas nama "demi ketertiban umum dan kepastian hukum".

Bergerak dengan menggunakan pendekatan lain, yakni politik kebudayaan. Manusia adalah subjek utama dalam politik kebudayaan. Kebudayaan sebagai *political culture of resistance and opposition*. Hal ini memungkinkan lahirnya solidaritas dan koalisi yang luas di antara mereka yang dalam posisi lemah. Kebudayaan menjadi sarana politis dalam perjuangan untuk perubahan sosial guna menembus kemapanan yang banyak menyumbungkan praktik-praktik ketidakadilan. (John Foran, ed. *Theorizing Revolution*; 1997).

Berbeda dengan politik hukum yang akarnya adalah kebijakan hukum dan terhubung secara langsung dengan kebijakan publik yang berorientasi pada penekanan aspek ekono-

mi. Keteraturan yang sesungguhnya rentan akan konflik karena akan memihak yang kuat, relasi kuasa akan bertarung di arena sosial, pelajaran soal inklusivitas tak lagi soal, sehingga dikriminasi dalam segala bentuk menjadi keniscayaan. Di sinilah pentingnya visi kebudayaan suatu bangsa diletakkan.

Terdapat empat alasan mengembangkan politik kebudayaan (L Bonet, 2007), pertama nilai strategis budaya sebagai penyebar standar simbolis dan komunikatif, kedua perlunya menempa identitas kolektif, ketiga dampak positif pada ekonomi dan sosial karena mengembangkan kreativitas. Dan terakhir, pentingnya memelihara kekayaan kolektif (budaya, sejarah, tradisi, dan seni).

Barangkali ada suatu transisi yang dilupakan ketika negara ini hendak dan sedang dijalankan. Bahwa transformasi sosial tak pernah luput dari ujian, pada saat yang sama persoalan pemerintahan pembangunan menyusun pengalaman "kewargaan" masing-masing warga negara, bergulat dengan persoalan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap negara sehingga memunculkan rasa frustrasi dan tidak lagi percaya pada negara. Nilai-nilai baru pun tumbuh ketika manusia bergulat dengan semua itu.

Pada suatu tahap, seperti yang dilakukan oleh sekawanan orang yang menyebut dirinya bagian dari Sunda Empire yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan mengembirakan di masa yang akan datang. Ini menyebabkan negara yang berada di luar garisnya serta-merta mengatakan bahwa gerakan itu adalah pelanggaran konsensus bernegara dan mesti

diganjar dengan hukuman, atau di sisi lainnya masyarakat yang memiliki keluh kesah yang sama mungkin bisa jadi tidak peduli.

Sementara itu, orang-orang yang berada di dalam garisnya merasa nyaman dan tumbuh harapan, tak bingung karena memikirkan naiknya iuran BPJS atau mahalnya tarif listrik. Kita tinggal menunggu bagaimana gerakan Sunda Empire bermetamorfosis; menjadi sebuah fenomena sosial atau riwayatnya berakhir menjadi kasus hukum.

Seketika saya teringat pada pemikiran Edward Said seorang pemikir dan akademisi Amerika Serikat keturunan Palestina. Ia terkenal sebagai pemikir yang mendirikan bidang pemikiran pascakolonialisme.

Menurut dia, sejarah manusia adalah konstruksi ideologis yang didasarkan pada kombinasi yang ganjil antara yang "empiris" dan yang "imajinatif". Yang empiris berupa tanah dan manusia, sedangkan yang imajinatif adalah pikiran dan cita-cita bersama.

Ungkapan menggelitik lainnya dari seorang Gunawan Mohamad, ia katakan bahwa dalam sejarah sebuah bangsa terkandung pula di dalamnya sejarah kebudayaannya; cerita tentang lapar, tentang kreativitas, tangan, dan keringat manusia yang menembus batas. Di sini saya mulai meyakini bahwa Sunda Empire adalah penanda sekaligus dilema dalam menafsir makna cita-cita ideal negara juga makna keadilan. Sisi lainnya, Sunda Empire adalah juga suatu kalimat tanya untuk negara; "masih ingatkah janji dan cita-cita bersama?"***